



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56

- Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagaian Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.1. Belanja Tidak Langsung angka 1) Belanja Pegawai huruf (e) angka 1, 2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Katingan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan **Beban Kerja** setiap bulan dengan besaran sebagaimana yang sudah ditentukan yang meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Katingan yang bekerja di ibukota Kabupaten dan tidak termasuk Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Tenaga Medis dan Paramedis, Guru, Sopir/Motoris diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.5
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Penetapan
1	Pejabat Struktural Eselon II	Rp. 725,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
3	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
6	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
7	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
8	Pelaksana Golongan III	Rp. 425.000,00
9	Pelaksana Golongan II	Rp. 400.000,00
10	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Tasik Payawan dan tidak termasuk Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Tenaga Medis dan Paramedis, Guru, Sopir/Motoris diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.6
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja di Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Kamipang dan tidak termasuk Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Tenaga Medis dan Paramedis, Guru, Sopir/Motoris diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.7
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja di Kecamatan Marikit, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala dan tidak termasuk Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Tenaga Medis dan Paramedis, Guru, Sopir/Motoris diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.8
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat **Beban Kerja** setiap bulan dengan ketentuan yang meliputi :
- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis di RSUD Kasongan diatur sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.9
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Katingan Hilir diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.10
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Tewang Sanggalang Garing dan Kecamatan Tasik Payawan diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.11
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00

6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, dan Kecamatan Kamipang diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.12
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Marikit, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Sanaman Mantikei diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.13
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.14
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Struktural Eselon III	Rp. 700,000,00
2	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 625,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
6	Pelaksana Golongan IV	Rp. 498,000,00
7	Pelaksana Golongan III	Rp. 425,000,00
8	Pelaksana Golongan II	Rp. 400,000,00
9	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kec.Katingan Hilir diatur sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.15
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- h. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Tasik Payawan diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.16
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450.000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- i. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Kamipang diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.17
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- j. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Marikit, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.18
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

- k. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.19
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 550,000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 450,000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 400,000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 350,000,00

3. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai anggota Satpol PP dan anggota Pemadam Kebakaran, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja setiap bulan yang ditetapkan sebesar Rp. 420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).
4. Bantuan Biaya Pemulangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Katingan di bayar berdasarkan pangkat / golongan terakhir dalam Surat Keputusan Bupati Katingan;
5. Bantuan Biaya Pemulangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada point 4 diatas agar mengajukan permohonan dengan lampiran terdiri dari :

1. Surat Keputusan Pensiun / Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) ;
 2. Rencana Biaya Pemulangan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan ;
 3. Kwintansi Pembayaran Bantuan Biaya Pemulangan Pensiun ;
 4. Bukti - Bukti Transaksi lainnya (berkenaan dengan pemulangan pensiun)
-
6. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Petugas Kebersihan (Claning Service) awal penganggarannya dipusatkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, anggaran tersebut di kembalikan ke masing - masing SKPD terhitung dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang tidak diubah dan dicabut dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tetap berlaku.

BAB II

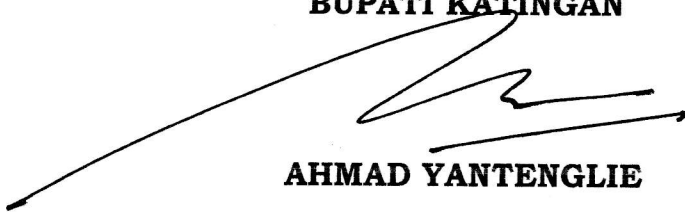
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 18 - 9 - 2013

BUPATI KATINGAN



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 18 - 9 - 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR : 119